



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PERPUSTAKAAN
KOMISI X DPR RI
KE KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
22 S.D. 24 JANUARI 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut akan dapat dicapai dengan adanya Pendidikan yang baik dan berkualitas dan Perpustakaan merupakan salah satu jantung Pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu ekonomi modern dengan tingkat kesejahteraan berkualitas, maka dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi. Maka diperlukan peran perpustakaan sebagai pendukung pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mendukung pilar sekaligus pondasi yang memperkokoh kualitas SDM.

Perpustakaan berperan dalam membangun masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) melalui usaha menumbuhkan tradisi dan budaya baca masyarakat. Perpustakaan juga memiliki peran sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat kebudayaan, untuk menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab.

Arah kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan antara lain mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Indikator dan target dari Perpustakaan Nasional pada tahun 2020-2014 antara lain adalah meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovasi, dan kreatif serta nilai budaya literasi (nilai). Dalam upaya meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas, maka diperlukan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif, serta indeks pembangunan literasi masyarakat.

Perpustakaan berperan dalam meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, melalui pengembangan literasi informasi terapan untuk kesejahteraan masyarakat. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0.

Perpustakaan Nasional telah melakukan survei kegemaran membaca yang dilaksanakan di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi pada tahun 2019 dengan 3 parameter yaitu frekuensi membaca per minggu, durasi/intensitas membaca dalam sehari dan banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir, maka didapatkan hasil capaian indeks budaya baca sebesar 53,85 dengan kategori sedang.

Dari data tersebut di atas, maka perpustakaan perlu melakukan peningkatan budaya literasi melalui pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi dan peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.

Ada empat tingkatan literasi yaitu kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bacaan, mampu memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, mengemukakan ide atau gagasan baru, teori baru, kreativitas dan inovasi baru serta akhirnya menciptakan barang atau jasa yang bermutu bagi kehidupan.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk perpustakaan. Pandemi COVID-19 mengharuskan Pemerintah untuk membatasi mobilitas penduduk dan interaksi jarak dekat di ruang-ruang publik. Pada masa pandemi COVID-19, Perpustakaan diharapkan tetap mengadakan kegiatan untuk memfasiliasi kebutuhan masyarakat meskipun di masa pandemi, sebagai bagian dari kontribusi bagi masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kebersihan lingkungan, sarana prasarana layanan.

Budaya literasi perlu diperkuat sebagai salah satu upaya agar mampu bangkit dari keterpurukan. Hal ini penting karena literasi sebagai bentuk *cognitive skills* memiliki peran besar dalam upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi. Masyarakat dengan kemampuan literasi yang baik cenderung akan lebih siap menghadapi dampak buruk pandemi. Hal ini akan mempengaruhi sikap seseorang dalam menentukan respons terhadap suatu persoalan. Kepanikan masyarakat timbul sebagai reaksi spontan yang sering dipicu oleh informasi yang tidak benar (*hoax*) yang beredar luas. Masyarakat dengan tingkat literasi tinggi akan selalu melakukan konfirmasi atas kebenaran informasi yang diperoleh. Masyarakat dengan kemampuan literasi baik cenderung lebih sadar terhadap rentannya kondisi pandemi, mampu mendeteksi gejala secara mandiri, lancar dalam berkomunikasi dengan tim medis, sehingga selalu siap melindungi diri seperti mengkonsumsi suplemen secara tepat guna dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Secara umum, pandemi COVID-19 setidaknya memiliki 3 aspek yang dampaknya berpengaruh pada perpustakaan yaitu pertama, aspek layanan: aspek layanan perpustakaan berubah yang selama ini Pemustaka datang langsung tatap muka melakukan layanan peminjaman, pengembalian maupun perpanjangan koleksi, saat ini harus berubah dengan koleksi digital. Kedua, aspek anggaran dan kegiatan: anggaran pada perpustakaan juga terkena dampaknya di mana anggaran yang sudah direncanakan untuk kegiatan perpustakaan, harus dilakukan perubahan dan pemusatan kembali (*refocusing*) untuk pencegahan COVID-19. Kegiatan yang biasa dilakukan *offline* seperti seminar dan *workshop* juga beralih ke dalam jaringan (*daring*). Ketiga, aspek Pustakawan: Pustakawan yang setiap hari berinteraksi dengan pengguna dalam mencari dan menemukan informasi yang ada, kini beralih dengan memanfaatkan internet sebagai media interaksi dengan pengguna.

Akses koleksi digital baik *ebook*, *ejurnal*, majalah maupun surat kabar diharapkan oleh Pemustaka terutama akses melalui telepon genggam yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan dimana saja. Pandemi COVID-19 ini menjadi pembelajaran bagi perpustakaan agar menyediakan koleksi digital yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Pemustaka.

Kebijakan pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh perpustakaan antara lain membentuk kader kesehatan yang bertugas sesuai protokol COVID-19, melakukan sosialisasi dan pencegahan COVID-19, menggunakan *thermometer*/pengukur suhu tubuh untuk setiap orang yang masuk area perpustakaan, menyediakan *hand sanitizer*, dan melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh area perpustakaan.

Terkait hal-hal tersebut di atas, berdasarkan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2020, Komisi X DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten (Kota Serang), Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan di masa pandemi COVID-19.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (4) huruf f.

10. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 60 ayat (3) huruf f.
11. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2020.
12. Surat Tugas Pimpinan DPR RI Nomor PS.01/PS 10/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Provinsi Banten (Kota Serang) selama 3 (tiga) hari tanggal 22 s.d 24 Januari 2020.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan di daerah dan koordinasi dengan perpustakaan desa dan komunitas literasi serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) di masa pandemi.

Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah dalam pengelolaan perpustakaan di daerah di masa pandemi.

D. Ruang Lingkup

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik sebagaimana dimaksud di atas, ruang lingkup kunjungan meliputi:

1. Mengevaluasi pengelolaan perpustakaan pada masa pandemi Covid-19.
2. Mengevaluasi pengelolaan perpustakaan daerah, perpustakaan desa dan komunitas literasi.
3. Mengkaji peluang dan tantangan dengan adanya tumbuh kembangnya teknologi informasi terhadap perpustakaan di masa pandemi.
4. Mendengarkan dan menyaksikan secara langsung terhadap komitmen Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi dalam memajukan perpustakaan.

E. Metode Kerja

Metode kerja yang digunakan dalam kunjungan kerja spesifik ini antara lain:

1. Pertemuan dengan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon.
2. Pertemuan dengan Perpustakaan Kota Cirebon beserta jajarannya.
3. Pertemuan dengan Perpustakaan Komunitas, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa dan yang sejenis.
4. Pertemuan dengan Organisasi Profesi Perpustakaan.
5. Pertemuan dengan Komunitas Literasi.
6. Pertemuan dengan Pustakawan.
7. Pertemuan dengan Pemustaka.

F. Waktu dan Jadwal

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 dengan susunan rancangan jadwal seperti terlampir.

G. Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. Turut hadir dalam kunjungan kerja ini yaitu Dra. Ofy Sofiana, M.Hum. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI. Tim juga didampingi oleh Sekretariat, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Kondisi Objektif Pengelolaan Perpustakaan di Kota Cirebon

1. Temuan Data dan Informasi

a. Guna upaya memasyarakatkan keberadaan perpustakaan dan meningkatkan minat baca bagi masyarakat di Kota Cirebon, beberapa program-program yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi, memotivasi, mendukung, membina *stake holder* literasi dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca serta pengembangan literasi di tingkat Kota Cirebon.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi program Pembentukan Pojok Baca di setiap RW. Saat ini sudah terbentuk Pojok Baca di 73 RW dari 248 RW se-Kota Cirebon.
- 3) Melaksanakan pembinaan orang tua melalui program Bunda Literasi, guna memberikan peran orang tua dalam meningkatkan minat dan budaya anak gemar membaca Kota Cirebon.
- 4) Pelibatan seluruh *stake holder* melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat peduli literasi. Di antaranya program kreatif yang telah berjalan adalah program “Walisehati” atau Wakaf Literasi Sehati sebagai bentuk swadaya masyarakat peduli literasi dengan cara menyumbangkan bahan bacaan buku keagamaan dan alqur'an yg ditampung di perpustakaan untuk kemudian didistribusikan ke masjid-masjid.
- 5) Perpustakaan Daerah berperan sebagai perpustakaan rujukan bagi perpustakaan lainnya di Kota Cirebon.
- 6) Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di berbagai kesempatan yang ada.
- 7) Mengimplementasikan program & kegiatan perpustakaan yang telah direncanakan setiap tahunnya.
- 8) Memberikan layanan perpustakaan yang optimal bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon & sekitarnya melalui Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Keliling, I-Cirebon (Perpustakaan Digital), Perpustakaan Sekolah, Pojok Baca di RW/fasilitas umum, Perpustakaan Khusus.
- 9) Selalu berupaya meningkatkan & memperbaiki manajemen sumber-sumber kekayaan koleksi perpustakaan.
- 10) Pemerintah Daerah sudah menyiapkan Peraturan Daerah Penyelenggara Perpustakaan (dalam proses penetapan di DPRD).
- 11) Pada Tahun Anggaran 2021, Perpustakaan Daerah mendapat dukungan dana untuk pembangunan dan pengembangan gedung perpustakaan empat lantai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 12) Pelibatan komunitas-komunitas literasi berbasis masyarakat .

- b. Upaya Pemerintah Kota Cirebon untuk memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), meliputi :
 - 1) Memenuhi standar koleksi perpustakaan sebanyak 7.000 judul, eksisting telah tersedia 28.490 judul (di atas SNP).
 - 2) Berusaha memenuhi standar sarana prasarana gedung seharusnya 2.772.96 M2 (346.376.370 jumlah penduduk x 0.008. Eksisting baru 1.759.49 M2 sehingga rasionya baru terpenuhi 64.62 %, dengan kondisi ini perlu perluasan bangunan.
 - 3) Memenuhi standar pelayanan di antaranya jumlah kunjungan minimal 4.000 per tahun Kota Cirebon, eksisting telah mencapai 102.434 pengunjung di tahun 2019.
 - 4) Berusaha memenuhi standar sumber daya manusia di antaranya jumlah staf untuk melayani 346.376.370 yaitu 14 orang, eksisting saat ini baru ada 2 orang.

- c. Program/Kegiatan layanan perpustakaan selama masa pandemi yang telah dilaksanakan adalah sbb :
 - 1) Layanan Baca di gedung perpustakaan dibatasi sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19 dimana pada umumnya layanan baca di tempat ditutup, akan tetapi untuk layanan baca dilakukan secara online melalui aplikasi i-Cirebon (*e-library*) dengan jumlah koleksi buku sebanyak 1.051 judul 70.614 eksemplar.
 - 2) Pemanfaatan web *dispusip.cirebonkota.go.id* untuk layanan perpustakaan *online*, untuk peminjaman dan pengembalian buku secara *online*, dan pembuatan Kartu Anggota secara *online*.
 - 3) Penggunaan Sistem Perpustakaan Berbasis Online yaitu aplikasi SLIMS (*Senayan Library Management System*).
 - 4) Pendataan buku secara digitalisasi.
 - 5) Pemeliharaan buku melalui fumigasi.
 - 6) Lomba bercerita secara virtual.
 - 7) Alih media koleksi nasional dan naskah kuno.
 - 8) Pengembangan perpustakaan digital (I-Cirebon) bekerjasama dengan Perpustakaan RI dan perpustakaan daerah lainnya.

2. Permasalahan dan Kendala

- a. Belum semua para pemangku kepentingan memahami substansi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, hal ini disebabkan karena Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan masih terbatas.
- b. Masih banyak anggapan masyarakat bahwa perpustakaan tidak penting dan bukan kebutuhan dasar bagi kalangan umum.
- c. Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat di Kota Cirebon masih di bawah standar pengelolaan perpustakaan dan belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- d. Regulasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon tentang penyelenggaraan perpustakaan belum ada.
- e. Anggaran untuk perpustakaan sangat terbatas dan masih perlu dukungan dan komitmen dari para pemangku kebijakan.

- f. Adanya pemangkasan anggaran (*refocussing*) perpustakaan daerah untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19.
- g. Dukungan pemerintah untuk kesejahteraan pustakawan masih relatif rendah.
- h. Jumlah staf dan pustakawan di perpustakaan umum daerah sangat terbatas.

B. Masukan dan Pandangan Pengelola Perpustakaan dan Penggerak Literasi Kota Cirebon

1. Wakil Walikota Cirebon memberikan masukan informasi dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan sebagai berikut:
 - a. Kota Cirebon dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat menggelakkan program Lomba Gala Baca dan Jelajah Literasi dengan pendekatan alam.
 - b. Kota Cirebon mendapatkan bantuan pembangunan perpustakaan 4 lantai dan penggalakan digitalisasi literasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - c. Telah terbentuk komunitas-komunitas *story teller* dari Pustakawan di Kota Cirebon.
 - d. Meminta dukungan dari Komisi X DPR RI untuk pengembangan pembangunan perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - e. Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki komitmen untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat Kota Cirebon karena kualitas pendidikan daerah memiliki korelasi dengan minat dan kemampuan literasi membaca masyarakatnya.
2. Jaja Sulaiman, M.Pd, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon memberikan masukan dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan sebagai berikut:
 - a. Meminta dukungan regulasi dalam upaya meningkatkan komitmen keberpihakan *stake holder* dalam menetapkan kebijakan penganggaran urusan perpustakaan yang merupakan urusan wajib pemerintahan dan masyarakat.
 - b. Meminta dukungan pengadaan pengelola perpustakaan berkualifikasi pustakawan terampil di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendukung program & kegiatan perpustakaan sampai di 248 RW se-Kota Cirebon.
 - c. Meminta dukungan pengadaan sumberdaya ahli IT di bidang teknologi informasi untuk mendukung tugas kerja Pustakawan.
 - d. Meminta dukungan pelatihan IT untuk pengelola perpustakaan daerah/kecamatan dan perpustakaan kelurahan.
 - e. Meminta kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi petugas pengelola baik Pejabat Fungsional, Pustakawan maupun Petugas Pengelola.
3. Yulius Darmawan, S.Psi, Pembina Gerakan Literasi Cirebon/ Rumah Baca, memberikan masukan informasi dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan sebagai berikut:

- a. Setelah terjadinya pandemi COVID-19, kegiatan Rumah Baca telah mengalami kevakuman dan tidak melakukan aktifitas.
 - b. Selama pandemi saat ini beralih ke aktifitas konsultasi *parenting class online* via grup aplikasi *Instant Messaging* dengan orang tua siswa agar keterlibatan peran orang tua di rumah meningkatkan minat baca siswa tetap terjaga.
4. Komunitas Gelem Maca (Gerakan Literasi Membaca) Kota Cirebon, memberikan masukan informasi dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan sebagai berikut:
 - a. Target sasaran program literasi untuk SD dan SMP agar bisa membaca dan menulis.
 - b. Program Wisuda Literasi tiap tiga tahun dilakukan dengan dukungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - c. Salah satu terobosan agar minat membaca anak meningkat yaitu dengan memperkenalkannya ikon Kapten Literasi yang saat ini menjadi idola anak di Kota Cirebon.
5. Ibu Aliyah dari Asosiasi Pengelola Perpustakaan Sekolah Kota Cirebon, memberikan masukan informasi dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan bahwa selama pandemi COVID-19, buku-buku perpustakaan di sekolah belum bisa diakses, maka karena hal itu memohon agar ada dukungan sinergi antara Perpustakaan RI dan perpustakaan daerah untuk ada kemudahan akses bagi siswa mengakses buku-buku digital yang telah disediakan.
6. Lisma Rahmawati, Pengelola Perpustakaan 400 Kota Cirebon, memberikan masukan informasi dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan sebagai berikut:
 - a. Selama pandemi COVID-19, Perpustakaan 400 Kota Cirebon ditutup dan menghentikan sementara seluruh aktifitas pelayanan dan kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
 - b. Kegiatan literasi mingguan yang dihentikan sementara yaitu Kelas Menjahit yang biasa dilakukan setiap hari Senin. Kemudian *Kids Story* setiap hari Selasa, dan Kelas Merajut atau *Craft* setiap hari Rabu.
 - c. Sedangkan acara rutin bulanan yang dihentikan sementara, yaitu seperti Kelas Kuliner Jajanan Pasar, *Workshop Blogger*, Seminar Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini, Kelas *Arabic Food*, dan Kelas Merangkai Bunga.
7. Dra. Ofi Sofianah, M.Hum (Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan RI) memberikan masukan informasi dan usulan terkait pengelolaan perpustakaan sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan RI pada Tahun Anggaran 2021 memiliki program pengembangan Pojok Baca Digital yang bisa dimanfaatkan perpustakaan daerah untuk mulai mengembangkan program digitalisasi pelayanan perpustakaan.

- b. Menunggu usulan perpustakaan daerah untuk mengajukan bantuan DAK perpustakaan dengan menggunakan aplikasi KRESNA;
- c. Untuk layanan registrasi, Perpustakaan RI sudah membuka registrasi anggota berbasis *online* untuk menjadi anggota perpustakaan agar bisa mengakses semua fasilitas perpustakaan milik Perpustakaan RI.

III. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan program peningkatan literasi di Kota Cirebon berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya dukungan perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan menyediakan fasilitas perpustakaan yang cukup memadai, digitalisasi layanan perpustakaan melalui aplikasi I-Cirebon, adanya program pembinaan serta melibatkan komunitas-komunitas literasi dan pembentukan pojok baca sampai tingkat RW.
2. Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kota Cirebon masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan belum dilakukan secara massif, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dan mengunjungi perpustakaan, kurangnya SDM perpustakaan yang berkompeten, baik di perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah, belum optimalnya perpustakaan digital dan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
3. Dalam masa pandemi COVID-19 layanan perpustakaan masih berjalan tapi dengan protokol kesehatan dan lebih memaksimalkan layanan perpustakaan *online*.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan sinergitas dalam upaya pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan perpustakaan di daerah.
2. Komisi X DPR RI meminta agar sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan kepada *stake holder* dan penerapan Standar Perpustakaan Nasional (SNP) di perpustakaan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekolah dilakukan guna meningkatkan mutu layanan perpustakaan kepada masyarakat.
3. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI untuk bisa melakukan terobosan strategi peningkatan pelayanan dengan mendorong upaya percepatan digitalisasi perpustakaan, tidak hanya di pusat saja, tapi juga sampai di daerah.
4. Komisi X DPR RI meminta agar ketersediaan dukungan layanan fasilitas di perpustakaan tidak melupakan penyandang disabilitas.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh

perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 24 Januari 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444**